

## ANALISIS PREFERENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PADA PEMILU 2024 DI SUMATERA BARAT

Audy Joinaldy

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

[audyjoinaldy@gmail.com](mailto:audyjoinaldy@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji preferensi politik masyarakat Sumatera Barat dalam memilih calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penentu preferensi politik dan menganalisis implikasinya. Menggunakan teori pilihan rasional James Coleman, penelitian ini menekankan bahwa tindakan individu dipandu oleh nilai atau preferensi menuju tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dengan menekankan pada isu-isu preferensi politik yang ada dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga awam di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosiologi, psikologis, dan rasional memengaruhi preferensi politik masyarakat. Masyarakat yang aktif dan melek politik cenderung memiliki pandangan politik yang jelas, memilih berdasarkan keselarasan nilai dengan calon atau partai. Sebaliknya, masyarakat dengan pengetahuan politik rendah lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, seperti imbalan materi atau popularitas calon. Partisipasi politik yang tinggi berkorelasi positif dengan preferensi politik yang kuat. Faktor-faktor ini penting bagi calon legislatif dalam merancang strategi kampanye dan bagi pemilih untuk membuat keputusan rasional dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Preferensi Politik; Anggota Legislatif; Pemilihan Umum

### Abstract

*This study examines the political preferences of the people of West Sumatra in selecting legislative candidates for the 2024 General Election. The purpose of this study is to identify the determinants of political preferences and analyze their implications. Using James Coleman's rational choice theory, this study emphasizes that individual actions are guided by values or preferences toward specific goals. This study uses a qualitative research approach with an instrumental case study method, emphasizing issues of political preferences within the community. Data were collected through interviews with community leaders and ordinary citizens in West Sumatra. The results show that sociological, psychological, and rational factors influence people's political preferences. People who are active and politically literate tend to have clear political views, voting based on value alignment with candidates or parties. Conversely, people with low political knowledge are more influenced by personal interests, such as material rewards or candidate popularity. High political participation is positively correlated with strong political preferences. These factors are important for legislative candidates in designing campaign strategies and for voters in making rational and responsible decisions.*

**Keywords ;** Political Preference; Legislative Member; General Election

## **1. PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Di Indonesia demokrasi mengandung arti bahwa yang menjalankan kedaulatan adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapa yang berwenang mewakili rakyat, mekanisme yang diatur oleh konstitusi adalah melalui Pemilu. Melalui pemilihan umum dipilihlah wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam Pemilu diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

Dalam menentukan pilihannya, setiap masyarakat mempunyai preferensi politik yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan keberagaman yang terdapat di Indonesia. Lain daerah lain pula preferensi masyarakatnya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang cukup dahsyat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang calon-calon yang sedang bertanding. Preferensi politik adalah pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Preferensi politik terbentuk dari banyak faktor seperti lingkungan yang mengitari individu yang berpadu dengan pengetahuan politik yang didapatkan melalui proses internalisasi nilai-nilai politik setiap waktu.

Pemilih dalam menentukan preferensi politiknya, dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pertama, penentuan pilihan karena kesamaan ideologi dengan kandidat. Kedua, pilihan didasarkan pada afiliasi partai politik. Ketiga, pilihan karena kesamaan etnisitas atau unsur primordialisme lainnya seperti kesamaan asal kelahiran. Keempat, pilihan didasarkan pada pragmatism politik. Kelima, pilihan karena program dan integritas kandidat. (Aruman, 2009). Lima preferensi politik di atas merupakan dasar pemilih dalam menentukan pilihannya yang tidak sama dalam setiap daerah pemilihan di Indonesia, dan tentunya tidak ada yang salah jika seorang pemilih, memilih calon legislatifnya berdasarkan salah satu preferensi politik tersebut karena hal tersebut merupakan hak dan pandangan dari masing-masing pemilih. Namun akan menjadi masalah jika kemudian pemilih termanipulasi oleh pencitraan yang ditampilkan tanpa melihat rekam jejak dan kualitas calon legislatif yang akan mereka pilih. Satu hal lagi jika pemilih memang betul-betul tidak mempunyai data sedikitpun tentang calon yang akan dipilihnya namun memilih hanya berdasarkan besaran rupiah atau politik uang yang dimainkan oleh calon legislatif.

Pemilihan calon legislatif di Indonesia selalu diwarnai dengan intrik dan pola-pola yang dimainkan oleh para calon legislatif agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat yang terhormat dan hal ini juga terjadi di Sumatera Barat. Sebagai salah satu daerah dengan penduduk yang mayoritas muslim dan memegang teguh adat istiadat mempunyai keunikan tersendiri dalam menentukan calon legislatifnya. Masyarakat pemilih masih membutuhkan bukti yang bisa meyakinkan bahwa calon legislatif (caleg) tersebut memang mempunyai kompetensi dan berkapasitas sebagai wakil rakyat. Visi dan misi atau janji politik serta program dan harapan

masyarakat di daerah pilihannya harus bisa ditangkap dan benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dan kemudian dirumuskan secara gamblang sehingga mudah dipahami masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut menunjukkan belum adanya penelitian yang menyentuh aspek rasionalitas dan makna sosial dari pemberian suara sebagai bentuk implementasi dari preferensi politik masyarakat khususnya pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat. Apa yang baru ditawarkan dari hasil penelitian ini sehingga menjadi sesuatu yang berbeda dari penelitian sebelumnya?. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik masyarakat Sumatera Barat dalam memilih calon anggota DPR ?. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan dan tergolong baru karena kontestasi pemilihannya baru akan dimulai di tahun 2024, sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam lagi Analisis Preferensi Politik Masyarakat Terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Pemilu 2024 Di Sumatera Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik masyarakat di Sumatera Barat.

### **KONSEP PREFERENSI POLITIK**

Preferensi diambil dari kata prefer, artinya yang paling disukai atau dapat juga disebut ketetapan individu dalam memutuskan pilihan terhadap suatu objek. Preferensi secara umum, bisa diartikan sebagai satu pilihan seseorang apakah suka atau tidak suka terhadap suatu produk barang atau jasa. Preferensi sebagai suatu kesukaan seseorang atas berbagai jenis produk atau jasa (Pamator Journal, 2018). Sedangkan menurut Teori Porteus Preferensi adalah bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu atau masyarakat dan komponen-komponen tersebut adalah persepsi, sikap, nilai, kecenderungan dan kepuasan. Komponen tersebut saling memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Setiap individu menentukannya dalam memilih (Jalaludin Rahmat, 2001).

Preferensi politik juga dapat diartikan dengan kecenderungan pilihan politik seseorang yang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang. Preferensi ini akan terwujud dalam sebuah tindakan politik. Tindakan politik tersebut diwujudkan dari nilai-nilai politik yang diyakini seseorang, sehingga menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mengarahkan dan mempengaruhi situasi politik yang dihadapinya. Sedangkan perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan fungsi sosial politik, hak kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik. Dimaksud dengan perilaku politik adalah (Handoko, 2016): Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin wakil rakyat, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM, ikut serta dalam pesta politik, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas, berhak menjadi calon pimpinan politik, serta berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku.

Perilaku politik pemilih yang terimplementasi dalam pemberian suara merupakan suatu pilihan dari berbagai ekonomi neoklasik. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihannya (Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2005).

Dalam sosiologi teori ini dipopulerkan oleh James Coleman. Menurut Coleman bahwa teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari seseorang individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan ditentukan oleh nilai atau pilihan. Tetapi Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka (Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2005).

Perilaku memilih rasional ini sebenarnya merupakan ekspresi dari sebuah sistem demokrasi dan ekonomi yang mapan. Adapun relasi kausalitas tersebut menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih itu juga disebabkan karena pengaruh paradigma supply and demand dalam ekonomi terlebih lagi bagaimana para politisi mengelola kebijakan ekonomi dan dampaknya (Duch and Stevenson, 2005). Hal tersebut yang berdampak evaluasi kritis pemilih baik yang bersifat retrospektif maupun perspektif (Mc Allister, Sheppard & Bean, 2015). Hal yang perlu dicatat ketika membaca kemunculan pemilih rasional di konteks negara berkembang tentunya berbeda dengan demokrasi mapan.

Faktor penting yang membedakan adalah secara kuantitas populasi pemilih rasional yang lebih sedikit karena umumnya lebih terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu, pula secara kualitas sikap pragmatism tidak selalu berujung pada sikap kritis dan idealis, namun lebih permisif dalam melihat ekonomi. Kedua premis inilah yang menjadi poin penting dalam membaca konteks pemilih rasional di negara berkembang khususnya Indonesia. Makna ekonomi ini tidak selalu berhubungan kebijakan, namun juga bisa uang politik yang lazim terjadi dalam banyak kasus kampanye di Indonesia (Aspinal & Sukmajati, 2015). Dalam kasus Indonesia ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih ini terkadang naik turun. Konteks ini terlihat bagaimana rasionalitas pemilih Indonesia tidak selalu idealis, bahkan dinamis. Kondisi ini menyebabkan rasionalitas pemilih Indonesia sendiri masih dalam tahapan transisi (Jati, 2022).

Pada konteks pemilihan Caleg di Sumatera Barat pemilih merupakan aktor jika dikaitkan landasan dasar dari teori pilihan rasional Coleman. Masyarakat atau pemilih merupakan aktor yang memiliki tujuan yaitu melaksanakan pemilihan umum calon legislatif agar memperoleh wakil rakyat yang benar-benar pro kepada rakyatnya. Teori pilihan rasional Coleman (dalam Ritzer & Goodman, 2005) digunakan sebagai alat analisis utama untuk menginterpretasikan preferensi masyarakat sebagai tindakan rasional yang memaksimalkan utilitas, sementara pendekatan sosiologis dan psikologis sebagai pendukung. Pilihan yang ditentukan oleh pemilih memang murni dari kesadaran dan hati nurani tanpa ada intervensi dari

pihak lain, maka pilihan ini rasional. Ketika masyarakat atau pemilih memilih dengan diberikan sejumlah uang dari tim pendukung atau calon legislatif untuk memilihnya di Pemilu, pemilihan ini tidak rasional karena terdapat intervensi berupa uang yang diberikan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dengan menekankan pada isu-isu preferensi politik yang ada dalam masyarakat. Fokus pada isu ini menjadi perhatian banyak peneliti di banyak negara dan daerah di Indonesia karena dinamisnya faktor yang mempengaruhi pembentukan preferensi politik ini. Dalam hal ini peneliti bermaksud memahami apa saja faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dan implikasinya dalam menentukan pilihan caleg DPR RI tahun 2024 secara mendalam guna mendapatkan data yang sesuai yang diharapkan dalam penelitian ini. Sumber untuk memperoleh data melalui observasi wawancara dan dokumentasi, penelitian berpusat pada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap caleg DPR RI Sumatera Barat dan implikasinya.

Adapun wawancara telah dilakukan pada beberapa tokoh masyarakat Sumatera Barat yang terdiri dari pemuka agama, akademisi, pengusaha, anggota partai, wartawan/jurnalis, dan juga masyarakat awam seperti pedagang di Pasar Raya, pengemudi ojek, buruh dan supir angkot. Penelitian yang dilakukan di Sumatera Barat telah dimulai pada 1 September 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Adapun pemilihan 14 (empat belas) narasumber ini didasarkan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan dan latar belakang sosialnya. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran hasil penelitian yang didapat dari semua kalangan yang berbeda namun bisa mewakili pandangan atau pendapat masyarakat di Sumatera Barat.

Sebagai ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dengan jumlah penduduk sebanyak 942.938 jiwa di Tahun 2023 (BPS 2024), merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, kesehatan, banyak didatangi oleh pendatang dari daerah lain di Sumatera Barat untuk mencari pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini menggambarkan keberagaman Kota Padang sebagai daerah pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial.

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial (Bungin, 2007: 53). Untuk memilih informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan secara sengaja (purposive sampling) (Bungin, 2007: 53). Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas data dan ciri-ciri dari subjek yang diinginkan dengan cara criterion sampling. Memilih informan dengan kriteria tertentu dengan tujuan informan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dalam penelitian informan kunci dan situasi sosial yang akan diamati yaitu masyarakat Kota Padang berdasarkan sampling.

Selain itu, sesuai dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 disampaikan bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah pemilih aktif tetap tertinggi di Sumatera Barat yakni sebanyak 666.178 orang, yang kedua Kabupaten Agam sebanyak 388.000 orang dan yang terendah dari Kota Padang Panjang sebanyak 43.482 orang dengan total pemilih sebanyak 4.088.606 orang.

Dari data tersebut di atas, Kota Padang menyumbang lebih dari 30 % partisipasi pemilihan anggota caleg untuk Pemilu Sumatera Barat. Dapat disimpulkan bahwa pemilih aktif Kota Padang dapat mewakili partisipasi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu di Sumatera Barat dari berbagai kalangan. (Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024).

### **3. HASIL DAN TEMUAN**

Sumatera Barat merupakan sebuah Provinsi yang didiami oleh suku Minangkabau dan beragama Islam. Masyarakat Minang terkenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan. Dengan kata lain, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai merupakan kerangka atau pola berkehidupan bagi orang Minangkabau, baik secara horizontal-vertikal dengan sang maha Pencipta maupun secara horizontal-horizontal antar sesama manusia, ataupun dengan makhluk lain di alam semesta (Zulfian Azrial, 2021).

Dalam berperilaku, masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh adat istiadat serta budaya yang telah dianut sejak dahulunya, tidak terkecuali berperilaku dalam memilih pemimpin pada pemilu, seperti yang telah dijelaskan pada faktor yang mempengaruhi perilaku memilih sebelumnya, budaya sangat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, hal ini dapat kita jumpai dalam perilaku memilih masyarakat Minangkabau dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan di Sumatera Barat.

Untuk melengkapi penelitian ini maka penulis telah melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya : apakah nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau mempengaruhi pembentukan sikap dan dukungan politik masyarakat kepada calon legislatif? Selanjutnya, apakah nilai-nilai keyakinan kepada agama (Islam) juga mempengaruhi pembentukan sikap dan dukungan politik kepada calon legislatif? Terakhir, selain dari aspek di atas, apa yang mempengaruhi pembentukan sikap dan dukungan kepada Calon legislatif di pemilu 2024 ini?.

Beberapa poin ini kemudian ditanyakan kepada 14 (empat belas) orang narasumber yang berasal dari berbagai kalangan seperti Dosen, Jurnalis, Pengusaha dan Petinggi Partai, Pedagang, Sopir dan Buruh. Meskipun tidak mewakili seluruh masyarakat Sumatera Barat

namun setidaknya sudah dapat menggambarkan preferensi politik masyarakat dalam menentukan calon legislatif yang akan mewakilinya di DPR.

Dalam pertemuan yang dilakukan peneliti dengan objek penelitian, penulis secara berhadapan saling bertatap muka. Beberapa hal yang ditemukan dari hasil wawancara langsung dengan Muhammad Taufid (Dosen UIN) :

“...Di Minangkabau itu orang berbudaya dulu, lalu beragama baru bernegara jadi proses pembentukan karakter itu budaya. Dalam konteks praktek agama pun tersingkirkan karena konstruksi kebudayaan. Dalam menentukan partai politik preferensi agama penting tapi itu bukan berarti merupakan satu-satunya. Jadi agama bermain pada tataran visual, contoh dulu waktu Prabowo menang di Sumbar bagaimana agama memainkan peran persepsi yang ditampilkan itu adalah Prabowo yang membela Islam. Sekarang Anies tidak hanya pembela Islam tapi representasi dari Islam maka bergeserlah pilihan masyarakat pada pemilu kali ini ke Anies Baswedan. Prabowo ditinggalkan karena pada level tertentu dia tidak representasi dari pada Islam. Seorang kandidat harus punya modal politik, modal ekonomi, modal kebudayaan, dan modal simbolik.

Hal yang senada juga dikatakan Alif Ahmad (Jurnalis), tergambar dari wawancara berikut ini :

“...Nilai adat dan budaya Minangkabau mempengaruhi pilihan kepada partai politik. Hal ini dikarenakan salah satu indikator masyarakat memilih itu adalah indikator adat dan budaya. Agama berpengaruh dan mempunyai persentasi yang paling tinggi. Agama menjadi tolak ukur bagi masyarakat Sumbar walaupun sebagian mereka tidak sholat tapi masalah pilihan politik tidak pernah main-main. Faktor lainnya dan menjadi fenomena saat ini adalah dimana bantuan secara ekonomi mempengaruhi memilih dalam menentukan pilihan. Untuk partai berbasis massa biasanya menjadi pilihan masyarakat karena bersifat situasional, sedangkan partai berbasis kader khususnya PKS juga dipilih oleh masyarakat Sumbar karena memilih menganggap partai berbasis kader tidak terpengaruh gonjang ganjing politik. Selanjutnya program kerja, visi misi dan pendidikan menjadi pertimbangan memilih dalam menentukan pilihan karena akan memperlihatkan kualitas seorang caleg. mudah kita lihat di medsos dan lain-lain. Jika melihat kebelakang anggota DPR yang sudah pernah terpilih lalu maju lagi sebagian dari yang terpilih terbukti bekerja untuk rakyat namun sebagian yang lain ada yang hanya slogan. Hal-hal lain seperti suku atau daerah asal, faktor ekonomi, referensi teman atau keluarga, identitas sosial caleg dan media sosial tidak menjadi variabel utama bagi saya dalam menentukan pilihan calon legislatif yang akan duduk di DPR.”

Temuan ini juga diperkuat oleh seorang pengusaha, Ridho Soraya di Kota Padang, yang tergambar dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“...Nilai adat, budaya dan agama sangat mempengaruhi arah politik masyarakat di Sumatera Barat. Hal ini dilatarbelakangi dari falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oleh karena itu, pilihan partai masyarakat juga didasarkan atas

keyakinan dan agama Islam. Sedangkan partai yang berbasis massa juga merupakan partai yang menjadi pilihan masyarakat pada setiap pemilihan umum di Sumatera Barat. Kualitas caleg, kinerja caleg tentunya menjadi pertimbangan seperti juga pendidikannya menjadi hal yang terpenting dalam menentukan pilihan. Latar belakang ekonomi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena jika ekonominya tidak terlalu kuat maka kemungkinan akan ada indikasi ketika dia terpilih dia akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya dan membuka peluang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya faktor, lingkungan nilai moral, nilai sosial, identitas sosial caleg juga menjadi pertimbangan. Identitas sosial menjadi pertimbangan juga. Kesamaan suku, media sosial dan juga pengaruh dari tokoh politik bukan merupakan faktor yang dianggap bisa mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.”

Hal senada juga dikatakan oleh tokoh masyarakat Eka Vidya Putra, seorang Dosen yang tergambar dalam wawancara ini, selain nilai adat dan budaya, disampaikan juga preferensi pilihan lain dari masyarakat adalah sebagai berikut :

“...Secara pribadi nilai adat dan budaya mempengaruhi perilaku dan sikap politik, tapi apakah semua orang Sumatera Barat dipengaruhi? Mungkin berpengaruh tapi sejauh mana itu mempengaruhi sikap politik pemilih karena semakin kedepan semakin berkurang pengaruhnya. Terutama generasi muda, mengapa bergeser? Karena yang budaya itu sendiri mengalami degradasi dan defisit. Politik kita hari ini secara prosedural secara kasat mata berjalan tapi minus demokratis. Nilai nilai yang ada dalam demokrasi itu minus. Minus nilai budaya minus kondisi sosial yang membatin. Lebih kepada kekinian bergantung kepada isu apa yang mendominasi hari ini. Sedangkan agama keyakinan mempengaruhi tapi itu bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan. Karena hari ini semua di framing, baik agama maupun budaya di framing perilaku.

Agama dan budaya mendominasi tapi tergantung kepada siapa yang mem framingnya. Bukan substansi agama, ideologi budaya. Sekarang yang lebih dinilai pencitraan diri yang populis. Selanjutnya perbandingan partai nasionalis dan islam, pemilih Sumatera Barat lebih memilih islam. Pemilu kali ini masyarakat tidak lagi memilih karena ideologi namun lebih kepada isu popularitas, gimmick dan sesuatu yang instan. Hal inilah yang menyebabkan minus demokrasi, yang terjadi di masyarakat generasi diajarkan dan ditanyakan kepentingan jangka pendek bukan jangka panjang. Akhirnya timbul pertanyaan kita ingin memenangkan politik dengan nilai-nilainya atau memenangkan politik dengan ansih politik? Memenangkan politik tapi menumbangkan demokrasi itu yang terjadi sekarang.

Dalam praktiknya kondisi sosial kita semakin merendah, pertemuan hanya sesaat, maka kedekatan tidak menjadi penting tapi yang penting itu massa dan popularitas. Jadi jika ditarik partai yang lebih menjadi pilihan masyarakat di Sumatera Barat, lebih kepada partai yang berbasis massa dibanding partai yang berbasis kader. Faktor lain yang mempengaruhi preferensi masyarakat diantaranya kualitas caleg, program kerja, visi misi dan latar belakang pendidikan. Pendidikan tersebut juga harus dilihat apakah dia benar-benar berpendidikan atau menambah-nambah sekolah. Disisi lain kesamaan etnis, daerah, dan tingkat ekonomi caleg

tidak berpengaruh pada preferensi politik masyarakat. Namun nilai yang ada pada caleg serta identitas sosial politiknya dianggap bisa mempengaruhi karena berkaitan dengan pengalaman jadi sejauh apa kinerjanya selama menjabat bukan jabatannya tapi kinerjanya. Terakhir media sosial, yang cukup berpengaruh dimana algoritmanya sudah terbentuk contoh kalau kita pendukung Anies maka yang akan sering keluar berita tentang Anies, jadi harus jadi kita yang mengatur algoritmanya biar balance. Namun dalam prakteknya tidak akan bisa balance karena setiap orang punya kecenderungan.”

Maka dari itu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai adat dan agama masih memiliki pengaruh yang kuat dalam politik di Sumatera Barat. Nilai-nilai ini menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih calon legislatif DPR. Oleh karena itu, penting bagi calon legislatif untuk memahami nilai-nilai adat dan agama di Sumatera Barat dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pada pemilu legislatif 2024, Sumatera Barat memiliki dua daerah pemilihan yaitu Sumbar 1 dan Sumbar 2. Sumbar 1 meliputi; Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. Sedangkan Sumbar 2 meliputi; Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh.

Setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi alasan preferensi politik masyarakat dalam menentukan calon legislatifnya. Pertama faktor nilai adat dan agama dimana nilai adat dan agama masih menjadi faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pilihan masyarakat dalam menentukan Calon legislatif DPR di Sumatera Barat. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai adat yang kuat cenderung memilih calon legislatif yang berasal dari nagari (desa adat) mereka atau memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Masyarakat yang taat beragama juga cenderung memilih Calon Legislatif yang satu keyakinan dengan mereka yang dianggap memiliki moral yang baik.

Maka dari itu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai adat dan agama masih memiliki pengaruh yang kuat dalam politik di Sumatera Barat. Nilai-nilai ini menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih calon legislatif DPR. Oleh karena itu, penting bagi calon legislatif untuk memahami nilai-nilai adat dan agama di Sumatera Barat dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan kemenangan PKS sebagai partai politik pemenang pemilu 2024 dengan meraih suara sebanyak 453.572 dari 2.919.883 suara (KPU Provinsi Sumbar). PKS yang dikenal dengan partai berbasis kader yang berideologi agama Islam dapat merebut hati para pemilih muslim di Sumatera Barat. Ditambah lagi dengan PKS sebagai salah satu partai pengusung calon presiden Anies Baswedan yang memang didukung oleh banyak ulama ternama. Bukan hanya program dan visi, misi tapi dari tampilannya pun kader PKS selalu mencerminkan seorang yang sangat islami. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai adat Minangkabau, seperti falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah") dan

agama Islam tetap menjadi faktor dominan dalam preferensi politik masyarakat Sumatera Barat, sebagaimana tergambar dari kutipan wawancara Muhammad Taufid yang menekankan peran agama sebagai "representasi dari Islam" dalam pilihan kandidat. Hal ini sejalan dengan pendekatan sosiologis dalam perilaku pemilih, yang menurut Lazarsfeld et al dalam model Columbia, perilaku memilih dipengaruhi oleh konteks sosial primer seperti keluarga, etnis, dan agama yang membentuk identitas kolektif. Dalam konteks Sumatera Barat, nilai adat dan agama berfungsi sebagai "lingkaran sosial" (social circles) yang mendefinisikan preferensi, di mana pemilih cenderung mendukung kandidat yang selaras dengan identitas Minangkabau dan Islam (Adlin, 2022), seperti terlihat pada perolehan suara PKS (453.572 suara) sebagai partai berbasis Islam.

Pendekatan sosiologis ini juga diperkuat oleh Alwi dan Ram (2024), yang menyatakan bahwa faktor demografis dan kultural seperti agama mendominasi keputusan pemilih di masyarakat tradisional, mirip dengan masyarakat Minangkabau yang masih menjunjung tinggi hubungan kekerabatan (nagari) dan moral agama. Namun, seperti yang diungkapkan Eka Vidya Putra dalam wawancara, pengaruh ini semakin bergeser pada generasi muda karena "degradasi budaya," menunjukkan dinamika sosiologis di mana faktor eksternal seperti framing media mulai mengintervensi identitas tradisional. Implikasinya, calon legislatif harus memanfaatkan simbol-simbol sosiologis ini dalam kampanye untuk mempertahankan dukungan, sebagaimana terlihat pada kandidat seperti Athari Gauthi Ardi (PAN) yang menonjolkan nilai agama dalam aktivitas sosialnya.

Kedua, Kualitas calon legislatif DPR, salah satu konsekuensi dari diberlakukannya pemilihan legislatif telah membuka wadah dan arena pertarungan politik yang mengakibatkan persaingan dan konsekuensi politik yang tinggi di tingkat daerah. Dalam hal ini, setiap orang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri dan bersaing untuk menjadi sarana dari perwakilan rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks ini setiap calon legislatif dituntut untuk memiliki kualitas yang kemudian menjadi preferensi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi maka terjadi pergeseran cara pandang pemilih dalam menentukan pilihannya terutama berkaitan dengan popularitas calon legislatif yang ditampilkan melalui media sosial, iklan-iklan di televisi nasional maupun lokal. Berita-berita yang dibuat khusus untuk menaikkan rating calon legislatif agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya bertumpu pada visi misi dan latar belakang pendidikan saja namun saat ini masyarakat lebih banyak menjatuhkan pilihannya pada calon legislatif yang dianggap bisa mewujudkan aspirasinya dan memenuhi janji-janji politiknya.

Kualitas calon legislatif, termasuk rekam jejak, visi-misi, dan citra diri seperti kesalehan dan kedermawanan, menjadi pertimbangan utama masyarakat, sebagaimana diungkapkan Ridho Soraya dalam wawancara yang menekankan pentingnya latar belakang ekonomi dan moral untuk menghindari korupsi. Temuan ini dapat dianalisis melalui pendekatan psikologis dalam perilaku pemilih, khususnya model Michigan dari Campbell, yang menekankan bahwa preferensi politik dibentuk oleh faktor psikologis seperti identifikasi partai, orientasi terhadap isu, dan evaluasi kandidat secara emosional (Kulachai et. al, 2023). Di Sumatera Barat, pemilih menunjukkan orientasi psikologis terhadap kandidat yang

"representatif" secara moral, seperti Andre Rosiade (Gerindra) dengan 114.914 suara, yang dikenal melalui aktivitas sosialnya (misalnya, bantuan untuk jamaah haji).

Pendekatan ini selaras dengan apa yang disebutkan Alif Ahmad dalam wawancara, di mana "kualitas seorang caleg" seperti program kerja dan pendidikan menjadi tolok ukur, mencerminkan proses kognitif di mana pemilih membentuk ikatan emosional (party identification) dengan kandidat yang dianggap "baik" secara psikologis. Lebih lanjut, Himmelweit dalam studi longitudinal mereka menyatakan bahwa evaluasi psikologis terhadap kandidat sering kali lebih kuat daripada faktor sosiologis di masyarakat yang semakin modern (Putra et. al, 2022), yang menjelaskan pergeseran di Sumatera Barat dari kandidat artis ke tokoh agama/masyarakat. Implikasi teoretisnya adalah bahwa pendekatan psikologis ini mendorong pemilih untuk lebih rasional dalam menilai kualitas, meskipun masih dipengaruhi oleh framing media sosial, sebagaimana Eka Vidya Putra soroti tentang algoritma yang memperkuat kecenderungan emosional.

Selain itu citra diri yang ditampilkan seperti kesalehan, kedermawanan dan kepintaran menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih calon legislatif yang akan mewakilinya di DPR. Jika di daerah lain banyak calon legislatif yang berasal dari kalangan artis berhasil menduduki kursi DPR berbeda dengan di Sumatera Barat dimana figur yang ditampilkan lebih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dan hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan suara dari calon legislatif yang akhirnya terpilih baik di Daerah Pemilihan 1 (satu) (Dapil) 1 (satu) maupun Daerah Pemilihan 2 (dua) Sumatera Barat diantaranya :

**Tabel 1. (Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1)**

| No. | Nama               | Jumlah Suara | Partai   |
|-----|--------------------|--------------|----------|
| 1.  | Linda Hendrajoni   | 94.553       | NasDem   |
| 2.  | Shadiq Pasadigoe   | 50.458       | NasDem   |
| 3.  | Andre Rosiade      | 114.914      | Gerindra |
| 4.  | Zigo Rolanda       | 58.107       | Golkar   |
| 5.  | Athari Gauthi Ardi | 91.211       | PAN      |
| 6.  | Rahmat Saleh       | 67.522       | PKS      |
| 7.  | Alex Indra Lukman  | 68.393       | PDIP     |
| 8.  | Rico Alviano       | 35.942       | PKB      |

*Sumber:* KPU Sumbar

**Tabel 2. (Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2)**

| No. | Nama                             | Jumlah Suara | Partai   |
|-----|----------------------------------|--------------|----------|
| 1.  | Nevi Zuairina                    | 68.564       | PKS      |
| 2.  | Arisal Aziz                      | 107.117      | PAN      |
| 3.  | Mulyadi                          | 103.683      | Demokrat |
| 4.  | Cindy Monica Salsabilla Seyiawan | 97.677       | Nasdem   |
| 5.  | Benny Utama                      | 75.255       | Golkar   |
| 6.  | Ade Rezki Pratama                | 68.418       | Gerindra |

*Sumber:* KPU Sumbar

Faktor ketiga, politik uang dan kepentingan, sekuat apapun nilai-nilai adat, budaya dan agama tertanam dalam sebuah daerah khususnya Sumatera Barat sepertinya tidak bisa menjamin bahwa praktik politik uang sepenuhnya bisa hilang. Politik uang sendiri telah menjadi semacam alat tawar politik (Bargaining Politics) demi pemenuhan kepentingan elektabilitas para calon legislatif DPR. Bagi sebagian calon, persoalan elektabilitas yang diraih dan diinginkan dalam kampanye pemilu tidaklah dengan cara kampanye ideologis. Hal ini dikarenakan politik uang telah menjadi kultur politik bagi elit politik. Para kontestan tersebut juga mengalami dilema elektoral bahwa mereka juga khawatir dengan perolehan suara rival atau lawan yang berani mengeluarkan banyak uang. Adanya dilema elit yang didorong kekhawatiran kalah ini yang berdampak pada sebagian besar pemilih Sumatera Barat sehingga menjadikan politik uang sebagai bagian dari dinamika kampanye seorang calon legislatif

Meski mengalami pergeseran namun tidak serta merta masyarakat Sumbar memilih calonnya dikarenakan politik uang. Fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa kelompok pemilih yang tidak menoleransi perilaku politik uang masih mendominasi pada pemilu 2024 ini. Suatu hal yang unik di Sumatera Barat, terjadi kecenderungan pragmatisme dalam menyikapi politik uang, Dimana mereka akan terima pemberian politik uang tersebut namun secara rasional mereka tetap berpegang pada nurani dalam memilih calon legislatifnya.

Temuan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa perilaku pemilih rasional dalam menyikapi politik uang seperti mengalami kemunduran idealisme sebagai pemilih. Praktik politik uang tetap ada meskipun tidak mendominasi, dengan masyarakat sering menerima pemberian tetapi tetap memilih berdasarkan nurani, sebagaimana tercermin dalam temuan bahwa kelompok urban lebih menolaknya dibandingkan rural. Hal ini dapat dianalisis melalui teori pilihan rasional Coleman (dalam Ritzer & Goodman, 2005), yang memandang pemilih sebagai aktor rasional yang memaksimalkan utilitas (kegunaan) berdasarkan nilai dan preferensi, di mana tindakan dipilih untuk mencapai tujuan seperti wakil rakyat yang pro-rakyat tanpa intervensi eksternal. Dalam konteks Sumatera Barat, pemilih rasional seperti yang digambarkan Alif Ahmad—yang menolak faktor ekonomi sebagai variabel utama—menggunakan pertimbangan mendalam untuk menghindari "intervensi" seperti uang,

sebagaimana Coleman tekankan bahwa aktor rasional menghindari tindakan yang tidak selaras dengan nilai intrinsik. Namun, seperti yang diungkapkan Eka Vidya Putra, rasionalitas ini dinamis dan transisional, sejalan dengan Duch & Stevenson (2005) yang menyatakan bahwa evaluasi ekonomi (retrospektif/perspektif) memengaruhi pilihan rasional, terutama di negara berkembang di mana politik uang menjadi "dilema elektoral" (Aspinal & Sukmajati, 2015). Temuan ini juga menunjukkan perbedaan antara pemilih urban (rasional kritis) dan rural (pragmatis), mencerminkan transisi rasionalitas di Indonesia seperti yang dibahas Jati (2022), di mana pemilih tidak selalu idealis tetapi memaksimalkan utilitas jangka pendek. Implikasinya, teori pilihan rasional Coleman berguna sebagai alat analisis untuk menjelaskan mengapa mayoritas pemilih Sumatera Barat tetap rasional (menolak pengaruh uang sepenuhnya), meskipun ada kemunduran idealisme, dan ini tercermin pada kenaikan suara partai seperti NasDem yang lebih fokus pada isu nasional daripada transaksi uang.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya dan hampir tidak sama di setiap daerah pemilihan. Khusus Sumatera Barat, mayoritas pemilih lebih mengutamakan calon legislatif yang bisa merepresentasikan agama dan aspirasi masyarakatnya terutama dalam hal memilih calon presiden. Maka dari itu calon-calon yang berasal dari partai pengusung calon presiden yang menang di Sumatera Barat akan mendapat suara terbanyak dari pemilih. Hal ini saling mempengaruhi, terbukti bahwa partai pemenang Pemilu 2024 di Sumatera Barat adalah PKS dengan perolehan suara sebanyak 453.5271 sebagai partai berideologi Islam dan partai yang memimpin pemerintah Provinsi 15 tahun berturut-turut.

Sedangkan untuk kursi DPR terjadi kenaikan perolehan kursi oleh partai Nasdem sebagai Partai pengusung Capres 01 yang pada pemilu sebelumnya dimenangkan oleh Partai Gerindra karena merupakan partai pengusung Prabowo dimana, Capres Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden 2014 dan 2019 selalu memperoleh suara terbanyak di Sumatera Barat. Meskipun tidak terlalu signifikan berkurang perolehan kursi dari Partai Gerindra namun ternyata perubahan preferensi politik masyarakat Sumbar terhadap calon presiden mempengaruhi hasil perolehan suara dari partai pemenang pemilu di tahun ini.

Melihat hasil dari pemilu legislatif 2024 di Sumatera Barat maka dapat dikatakan bahwa telah tumbuh sikap rasionalisme di sebagian besar masyarakat, sehingga menimbulkan rasa optimis dikarenakan rasionalitas dalam pemilihan umum, kemudian dapat terbentuk secara simultan. Adapun basis responden terbesar yang dapat dianalisis sendiri berasal dari kalangan urban lebih sedikit dibanding penduduk rural. Paling tidak perilaku memilih rasional lebih terkonsentrasi di ruang perkotaan daripada pedesaan. Artinya memang kelompok kelas menengah menjadi basis penting penggerak dalam rasionalisme perilaku memilih ini.

Mereka yang mapan secara ekonomi, berpendidikan maupun informatif secara sosial akan menolak dalam menerima politik uang yang ada. Adanya ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa rasionalitas dalam menghadapi godaan uang sebenarnya masihlah belum merata. Kadar kekritisannya masyarakat sipil sebagaimana hasil survey tersebut masih perlu ditakar lebih lanjut apakah itu dibentuk secara permanen ataukah temporer. Hal ini dikarenakan telah terjadi pergeseran dari masa pemilu ke pemilu berikutnya, dimana pada pemilu 2024 saat

ini perilaku memilih rasional yang independen dari politik uang dan hadiah semakin meningkat.

Mayoritas masyarakat memberikan pernyataan mengenai penolakannya terhadap adanya praktik-praktik politik uang namun juga tidak sedikit yang menerimanya. Artinya mayoritas masyarakat Sumatera Barat merupakan pemilih rasional meskipun masih ada yang memberikan respon terhadap politik uang. Dengan menjawab mereka akan menerimanya, namun bukan berarti hal tersebut kemudian dapat mengubah pilihannya di dalam bilik suara. Artinya walaupun menerima masyarakat tersebut tetap akan memilih sesuai dengan pilihannya sendiri

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat Sumatera Barat masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis. Nilai adat dan agama yang kuat—tercermin dalam falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”—menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik. Pemilih cenderung memilih calon legislatif (Caleg) yang memiliki latar belakang sosial, religius, dan kualitas personal yang sesuai dengan nilai budaya dan agama masyarakat. Sosok Caleg yang tampil dengan kesalehan, kedermawanan, kepintaran, serta rekam jejak yang baik lebih mudah mendapat simpati pemilih.

Di sisi lain, pendekatan psikologis juga memengaruhi preferensi, meskipun tidak dominan. Ikatan emosional dengan Caleg, kesamaan ideologi, serta kedekatan melalui keluarga, organisasi, atau rekam jejak sosial menjadi daya tarik tersendiri. Pemilih yang memiliki hubungan emosional lebih cenderung loyal, meskipun faktor ini bukanlah alasan utama di Sumatera Barat. Orientasi terhadap partai politik dan isu tertentu juga berpengaruh, namun pengaruhnya lebih terbatas dibandingkan faktor sosiologis.

Pendekatan pilihan rasional hadir dengan dinamika tersendiri. Sebagian pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi, misi, dan program kerja Caleg, tetapi praktik politik uang masih mengaburkan batas antara rasional dan tidak rasional. Pemilih lanjut usia, berpendidikan rendah, dan tinggal di pedesaan cenderung terpengaruh janji atau bantuan materi. Sementara itu, pemilih pemula kerap mengikuti pilihan keluarga atau tokoh masyarakat. Secara keseluruhan, preferensi politik masyarakat Sumatera Barat merupakan kombinasi antara faktor sosiologis yang dominan, pengaruh psikologis, serta pertimbangan rasional yang kadang terdistorsi oleh politik uang, sehingga caleg harus mampu memadukan strategi budaya, religius, emosional, dan programatik untuk memenangkan dukungan pemilih.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2022). Identitas budaya dan perilaku politik masyarakat Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*, 20(2), 115–130.
- Aruman. (2009). *Preferensi politik masyarakat dalam pemilu*. Jakarta:
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.

Duch, R. M., & Stevenson, R. T. (2005). *The economic vote: How political and economic institutions condition election results*. Cambridge: Cambridge University Press.

Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jati, W. R. (2022). Transisi rasionalitas pemilih di Indonesia: Antara pragmatisme dan idealisme. *Jurnal Politik*, 7(1), 22–40.

Kulachai, W., et al. (2023). Psychological approaches to voting behaviour in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 31(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/02185377.2023.2178342>

McAllister, I., Sheppard, J., & Bean, C. (2015). Political behaviour and electoral choice. *Electoral Studies*, 39, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.02.007>

Pamator Journal. (2018). Preferensi masyarakat dalam konteks sosial politik. *Pamator Journal*, 11(2), 45–58.

Putra, E. V., et al. (2022). Evaluasi psikologis kandidat dalam perilaku memilih. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(3), 211–228.

Rahmat, J. (2001). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori sosiologi modern* (6th ed.). Jakarta: Prenada Media.

Zulfian Azrial. (2021). Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam politik lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 55–70.